

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERTANAHAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP**



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN ANGGARAN 2022**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 pada lampiran VI bagian E.1.1 dan E.1.2 menyatakan bahwa Kepala SKPD menyampaikan rancangan akhir Renja SKPD kepada kepala Bappeda, dan Bappeda melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan-rancangan akhir Renja SKPD, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan SOPD dengan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RKPD.

Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk mewujudkan pelaksanaan Otonomi daerah agar sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, dan sesuai dengan amanat yang sudah dituangkan dalam aturan perundangan maka Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan telah menyelesaikan susunan Laporan Rancangan Akhir Renja SKPD Tahun 2022.

Demikian Laporan Rancangan Akhir Renja SKPD Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 ini kami sampaikan, kiranya dapat dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap SKPD Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Balangan.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	
1. Latar Belakang	
2. Landasan Hukum.....	
3. Tujuan.....	
4. Sistematika Penulisan.....	
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja.....	
3.3. Program dan Kegiatan.....	
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	
BAB. VI PENUTUP.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan bidang lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan nasional yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Keberhasilan pembangunan nasional tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur negara yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel. Setiap penyelenggara negara dan pemerintah harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.

Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan yang berkualitas yang melibatkan berbagai pihak baik Perencana, Pengambil Keputusan, Penegak Hukum dan Pejabat Pemerintah, maupun dunia usaha serta masyarakat. Oleh karenanya kesamaan persepsi dan sikap semua pihak yang terlibat dalam menghadapi persoalan lingkungan hidup perlu dibina agar pengelolaan dapat mencapai hasil yang optimal.

Rencana Kerja (Renja) mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, dan cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja (Renja) merupakan keputusan mendasar yang dinyatakan secara garis besar sebagai acuan operasional kegiatan organisasi, terutama dalam mencapai tujuan akhir organisasi.

Setiap instansi pemerintah diharapkan dapat mengembangkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pencapaian hasil yang diinginkan secara objektif. Dengan adanya Rencana Kerja (Renja), suatu satuan kerja dapat membangun strateginya sebagai bagian terpenting dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Balangan; (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan No.02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah No.43 Tahun 2008);
14. Peraturan Daerah kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan No.03 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah No.02 Tahun 2008);
15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021.

3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan Tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan landasan bagi setiap unit atau PNSD di lingkungan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup dalam menyusun perencanaan pembangunan dan pelayanan tahunan masing-masing sub satuan kerja. Sedangkan tujuannya antara lain untuk:

1. Menyiapkan antisipasi perubahan yang akan terjadi secara pro-aktif;
2. Membangun strategi pencapaian hasil kerja tahun 2022;
3. Memberikan komitmen pada aktivitas atau kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022;
4. Meningkatkan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antar sub satuan kerja atau antar PNSD lingkup Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
5. Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/SPPN dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Untuk menjabarkan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan serta memperhatikan situasi-situasi internal dan eksternal tahun berjalan;
7. Untuk menyusun pedoman pencapaian kinerja tahunan sebagai aktualisasi dari Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) secara sistematis, terencana, terarah dan berkesinambungan, sekaligus menampung aspirasi masyarakat dan integrasi dengan program/kegiatan sektor lainnya (lintas sektor).

4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dipahami dengan baik.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Pada bagian ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD. Selain itu bab ini juga memuat analisis Kinerja Pelayanan SKPD; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD; Review terhadap Rancangan Awal RKPD; dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN

Pada bab ini berisi telaahan terhadap Kebijakan Nasional; Tujuan dan Sasaran Renja SKPD; Program dan Kegiatan.

BAB IV. INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARAKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD

Pada bab ini menggambarkan indikator kinerja yang akan dicapai SKPD dikaitkan dengan target renstra periode berjalan.

BAB V. DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PRAKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF

Pada bab ini berisi dana indikatif tahun berjalan dan prakiraan maju.

BAB VI. SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai sumber dana yang dibutuhkan dalam menjalankan program dan kegiatan di SKPD pada tahun berjalan.

BAB VII. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis yang telah disusun. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan selama tahun 2019.

Evaluasi Program Tahun 2020.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja : Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
Target Kinerja : 100%
Realisai : 100%
Capaian Kinerja : 100%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator Kinerja : Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Target Kinerja : 100%
Realisai : 99%
Capaian Kinerja : 99%

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Indikator Kinerja : Persentase ASN yang mengikuti Bimtek
Target Kinerja : 100%
Realisai : 100%
Capaian Kinerja : 100%

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Indikator Kinerja : Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja
Target Kinerja : B (65)
Realisai : B (63,75)
Capaian Kinerja : 98,1 %.

5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja : Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air
Target Kinerja : 48,9 Indeks
Realisai : 53,33 Indeks
Capaian Kinerja : 109,1 %

6. Program Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam

Indikator Kinerja : Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara
Target Kinerja : 91,25 Indeks
Realisai : 91,17 Indeks
Capaian Kinerja : 99,9 %

7. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja : Persentase kasus pengaduan masyarakat yang tertangani.
Target Kinerja : 100%
Realisai : 100%
Capaian Kinerja : 100%

8. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Limbah dan Peningkatan Kapasitas

Indikator Kinerja : Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani
Target Kinerja : 97%
Realisai : 70,43 %
Capaian Kinerja : 72,61 %

CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

➤ Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

- Tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka menyediakan surat menyurat seperti materai dan perangko.
- Output: Jumlah jasa surat menyurat
- Realisasi fisik kegiatan sebesar 100% yaitu : Tersedianya perangko dan materai selama 12 Bulan.

➤ Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- Tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka menyediakan jaringan telepon kantor, air bersih dan listrik di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka menunjang terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran.
- Output: Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- Realisasi fisik kegiatan sebesar 100% :
Adapun realisasi fisik kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik adalah terbayarnya jasa telepon, pembelian air PDAM, dan pembayaran rekening listrik Dinas Lingkungan Hidup setiap bulan selama 12 bulan.

➤ Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

- Tujuan : Menyediakan peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk keperluan kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup.
- Output: Jumlah jasa kebersihan kantor.,
- Realisasi fisik kegiatan 100 %, yaitu :
Realisasi fisik kegiatan terlihat dari tersediaanya jasa kebersihan kantor setiap bulan selama 12 bulan, peralatan kebersihan dan bahan pembersih yakni sapu nilon, sapu pel lantai, kain pel lantai, serbet tangan, karbol lantai, sabun cuci tangan cair, pembersih kaca, sikat wc bertangkai, keset lantai kecil, keset lantai besar, gayung plastic, serok sampah, keranjang sampah,

pengharum ruangan otomatis, pengharum ruangan semprot, pengharum kamar mandi wc, pengharum lantai, tissue, kemoceng.

➤ Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja

- Tujuan : Menyediakan jasa perbaikan peralatan kerja pada Dinas Lingkungan Hidup.
- Output: Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja.
- Realisasi fisik kegiatan 100%, yaitu :
Pemeliharaan mesin ketik, pemeliharaan AC, pemeliharaan komputer dan laptop, pemeliharaan printer selama 12 bulan.

➤ Penyediaan alat tulis kantor

- Tujuan : menyediakan alat tulis kantor dalam rangka kelancaran kegiatan administrasi perkantoran Dinas Lingkungan Hidup.
- Output: Jumlah tersedianya alat tulis kantor.
- Realisasi fisik kegiatan 100%, yaitu :
Realisasi fisik kegiatan adalah tersedianya bahan pakai habis alat tulis kantor serta kelncaran kegiatan administrasi perkantoran. Tersedianya alat tulis kantor : kertas NCR , kertas HVS, kertas HVS warna, buku tulis, blangko SSP, buku folio, buku ekspedisi, buku agenda, amplop, tinta stempel, penghapus cair, paper clips, map odner, stopmap, ballpoint kering, ballpoint basah, spidol permanen, bantalan stempel, cutter besar, cutter kecil, kertas fax, tinta printer, isi cutter, kalkulator, pita printer, staffles kecil, stafler besar, isi stafles besar, isi stafles kecil, cartridge hitam, cartride warna.

➤ Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

- Tujuan : menyediakan barang cetak dan penggandaan untuk administrasi perkantoran.
- Output: Jumlah barang cetak dan penggandaan.
- Realisasi fisik kegiatan sebesar 100%, yaitu:
Realisasi fisik kegiatan penyediaan barang cetak dan penggandaan meliputi tersedianya barang pakai habis, map berkop dinas, amplop berkop dinas,

buku disposisi, blangko SPM, kartu ucapan hari besar agama dan kwitansi dinas. Selain itu juga terselenggaranya kegiatan pengandaan fotocopy.

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Tujuan : menyediakan komponen listrik/penerangan bangunan kantor.
 - Output: Jumlah komponen instalasi listrik.
 - Realisasi fisik kegiatan sebesar 100%, yaitu :
Realisasi fisik kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor adalah berupa komponen listrik/penerangan bangunan kantor.
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Tujuan : menyediakan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Output: Jumlah bahan bacaan surat kabar harian.
 - Realisasi fisik kegiatan sebesar 100%, yaitu :
Realisasi fisik kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan adalah berupa penyediaan bahan bacaan berupa Surat kabar-surat kabar setiap bulan selama 12 bulan.
- Penyediaan makanan dan minuman
 - Tujuan : Menyediakan makanan dan minuman tamu.
 - Output: Jumlah makanan dan minuman tamu.
 - Realisasi fisik kegiatan sebesar 100%, yaitu :
Realisasi fisik kegiatan penyediaan makanan dan minuman tamu adalah berupa penyediaan makanan dan minuman tamu di Dinas Lingkungan Hidup.
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - Tujuan : Menyelenggarakan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Kabupaten Balangan
 - Output: Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah.
 - Realisasi fisik kegiatan sebesar 100%, yaitu :
Adapun realisasi fisik kegiatan adalah jumlah perjalanan dinas untuk keperluan rapat koordinasi luar daerah selama 12 bulan.

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
 - Tujuan : Menyelenggarakan kegiatan koordinasi dan rapat-rapat dalam daerah
 - Output: Jumlah perjalanan dinas dalam daerah.
 - Realisasi fisik kegiatan sebesar 100%, yaitu :
Terselenggaranya kegiatan rapat-rapat konsultasi dan koordinas dalam daerah ke kecamatan-kecamatan di Kabupaten Balangan setiap bulan selama 12 bulan.

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- Pembangunan gedung kantor
 - Tujuan : Tersedianya gedung kantor
 - Output: Jumlah penambahan sarana gedung kantor
 - Realisasi fisik kegiatan sebesar 100%, yaitu:
Pembangunan gedung kantor, Pembuatan Drainase, Pembuatan Jalan dan Pembuatan parkir workshop.
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
 - Tujuan : Tersedianya perlengkapan gedung kantor.
 - Output: Jumlah tersedianya perlengkapan gedung kantor.
 - Realisasi fisik kegiatan sebesar 100%, yaitu:
Realisasi fisik kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor adalah berupa belanja umbul-umbul, belanja bendera dan belanja tangki air plastic.
- Pengadaan Peralatan Kantor.
 - Tujuan : Tersedianya peralatan kantor pada Dinas Lingkungan Hidup
 - Output: Jumlah tersedianya Peralatan Kantor.
 - Realisasi fisik kegiatan sebesar 75%, yaitu :
Tersedianya peralatan kantor berupa pengadaan AC dan Alat Suhu Tubuh.
- Pengadaan Mebeleur
 - Tujuan : Menyediakan Mebeleur untuk ASN
 - Output: Jumlah tersedianya mebeleur.
 - Realisasi fisik kegiatan sebesar 100% yaitu :

Tersedianya Meja dan Kursi sebanyak 2 set.

➤ Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

- Tujuan : menyelenggarakan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
- Output: Jumlah terpeliharanya gedung kantor.
- Realisasi fisik kegiatan sebesar 100%, yaitu :
Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor selama 12 bulan

➤ Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

- Tujuan : menyelenggarakan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pada Dinas Lingkungan Hidup.
- Output: Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional.
- Realisasi fisik kegiatan sebesar 100%, yaitu :
Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang meliputi servis rutin, penggantian suku cadang, penyediaan bahan bakar minyak dan penggantian oli serta pembayaran pajak mobil dan kendaraan dinas selama 1 tahun untuk Mobil operasional.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

➤ Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

- Tujuan : meningkatkan kapasitas, capability dari karyawan dan karyawan sesuai dengan tupoksi dan bidang yang digelutinya
- Output: Jumlah ASN yang mengikuti Bimtelk
- Realisasi fisik kegiatan sebesar 100%, yaitu :
Terselenggaranya kegiatan bimbingan teknis Dinas Lingkungan untuk mengikuti pendidikan, pelatihan formal dan bimtek sebanyak 15 kali.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

➤ Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

- Tujuan : Penyusunan laporan keuangan akhir tahun kegiatan SKPD

- Output: Jumlah dokumen laporan kinerja.
- Realisasi fisik kegiatan sebesar 100%, yaitu :
Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun kegiatan SKPD pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020 sebanyak 1 Dokumen.
- Penyusunan RKA dan DPA SKPD.
 - Tujuan : Penyusunan RKA dan DPA SKPD Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2019.
 - Output: Jumlah dokumen kinerja
 - Realisasi fisik kegiatan sebesar 100%. yaitu :
Tersusunnya RKA dan DPA SKPD Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020 sebanyak 1 Dokumen.
- Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD.
 - Tujuan : Penyusunan dokumen perencanaan SKPD Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2019.
 - Output:Jumlah Dokumen Perencanaan.
 - Realisasi fisik kegiatan sebesar 100%, yaitu :
Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020 sebanyak 1 Dokumen.

5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

- Pemantauan Kualitas Lingkungan
 - Tujuan : Meningkatnya kualitas lingkungan dengan mengendalikan pencemaran lingkungan
 - Output : Jumlah titik pantau air dan udara yang diamati.
 - Realisasi kegiatan fisik sebesar 100%, yaitu :
Terlaksananya kegiatan pemantauan kualitas lingkungan sebanyak 31 titik pantau.
- Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup
 - Tujuan : Meningkatkan kepedulian sekolah dalam pengelolaan lingkungan hidup

- Output : Jumlah sekolah adiwiyata yang di bina.
 - Realisasi fisik kegiatan sebesar 100%, yaitu :
 Terselenggaranya pembinaan dan sosialisasi sekolah Adiwiyata pada 4 sekolah di Kabupaten Balangan.
 - Inventarisasi Kerusakan Lahan
 - Tujuan : Tersedianya data inventarisasi kerusakan lahan di Kab. Balangan.
 - Output : Jumlah dokumen potensi kerusakan lahan.
 - Realisasi kegiatan fisik sebesar 100%, yaitu :
 Terlaksananya pembuatan dokumen inventarisasi kerusakan lahan di Kab. Balangan.
 - Operasionalisasi Laboratorium Lingkungan.
 - Tujuan : Tersedianya data laporan hasil uji laboratorium
 - Output : Jumlah parameter uji lingkungan
 - Realisasi fisik kegiatan sebesar 100%, yaitu :
 Terlaksananya pengujian parameter lingkungan sebanyak 20 parameter.
 - Peningkatan kapasitas dan SDM Laboratorium.
 - Tujuan : Meningkatnya status Laboratorium menjadi akreditasi.
 - Output : Status Laboratorium.
 - Realisasi fisik kegiatan sebesar 100%, yaitu :
 Peningkatan personal laboratorium.
6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
- Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem.
 - Tujuan : Terkelolanya keanekaragaman hayati dan ekosistem di Kabuapten Balangan.
 - Output : Jumlah terpeliharanya hutan kota
 - Realisasi fisik kegiatan sebesar 100%, yaitu :
 Terlaksananya kegiatan pemeliharaan di hutan kota selama 12 bulan.

➤ Program Kampung Iklim

- Tujuan : Terlaksananya program kampung iklim di Kab. Balangan.
- Output : Jumlah kampung iklim yang terbentuk.
- Realisasi kegiatan fisik sebesar 100%, yaitu :
Terlaksananya sosialisasi kegiatan kampung iklim sebanyak 1 kali di Kab. Balangan.

7. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

➤ Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Izin Lingkungan (AMDAL UKL/UPL)

- Tujuan : Meningkatkan pengawasan pelaksanaan AMDAL UKL/UPL di Kabupaten Balangan.
- Output : Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari Izin yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah
- Realisasi kegiatan fisik sebesar 100%, yaitu :
Pengawasan tempat usaha / industri yang mempunyai AMDAL UKL/UPL sebanyak 21 usaha /kegiatan.

➤ Fasilitasi penyelesaian pengaduan dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

- Tujuan : Terlaksananya fasilitasi penyelesaiannya seketika lingkungan hidup pengaduan kasus lingkungan hidup yang ditindaklanjuti/diverifikasi.
- Output : Jumlah kasus lingkungan yang tertangani.
- Realisasi kegiatan fisik sebesar 100%, yaitu :
Terlaksananya verifikasi kasus pengaduan lingkungan hidup sebanyak 2 kasus selama tahun 2020 di Kab. Balangan.

8. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Limbah dan Peningkatan Kapasitas.

- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
 - Tujuan : Terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
 - Output : Volume sampah yang berkurang melalui 3 R
 - Realisasi fisik kegiatan sebesar 94,2%, yaitu :
Terkelolanya persampahan dilingkungan masyarakat selama 12 bulan.
- Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura.
 - Tujuan : Meningkatnya kualitas kota sehat dengan penilaian adipura.
 - Output : Jumlah pembinaan titik pantau adipura
 - Realisasi kegiatan fisik sebesar 100%, yaitu :
Terlaksananya pembinaan titik pantau program adipura sebanyak 1 kali.
- Kegiatan Pemeliharaan Alat Angkutan Sampah
 - Tujuan : Terpeliharanya alat angkutan sampah dan alat berat
 - Output : Jumlah angkutan sampah yang terpelihara.
 - Realisasi kegiatan fisik sebesar 100%, yaitu :
Terpeliharanya alat angkutan sampah selama 17 Unit.
- Kegiatan Mengumpulkan dan Mengangkut Sampah dari TPS ke TPA.
 - Tujuan : Terangkutnya sampah di Kabupaten Balangan.
 - Output : Jumlah sampah yang terangkut
 - Realisasi kegiatan fisik sebesar 99 %, yaitu:
Terlaksananya pengangkutan sampah dari TPS ke TPA selama 12 bulan.
- Kegiatan Operasionalisasi TPA.
 - Tujuan : Terlaksananya operasionalisasi TPA
 - Output : Nilai TPA

- Realisasi kegiatan fisik sebesar 100%, yaitu:

Terlaksananya operasional TPA

- Administrasi perizinan Limbah cair dan B3
 - Tujuan : Terlaksananya ketaatan administrasi perizinan Pengelolaan B3 dan Limbah B3
 - Output : Jumlah usaha/kegiatan yang memiliki perizinan pengelolaan limbah
 - Realisasi fisik kegiatan sebesar 140%, yaitu :
Terlaksananya pendataan jumlah usaha/kegiatan yang memiliki perizinan pengelolaan limbah sebanyak 7 usaha/kegiatan.
- Pengelolaan B3 dan Limbah B3
 - Tujuan : Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3
 - Output : Jumlah pembinaan terhadap usaha/kegiatan penghasil limbah.
 - Realisasi fisik kegiatan sebesar 100%, yaitu :
Terlaksananya kegiatan sosialisasi B3 dan Limbah B3 sebanyak 13 usaha/kegiatan.
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup.
 - Tujuan : Terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
 - Output : Jumlah MHA dan kerarifan local atau hak pengetahuan tradisional yang teridentifikasi.
 - Realsasi fisik kegiatan sebesar 100%, yaitu :
Terlaksananya kegiatan identifikasi MHA di Kabupaten Balangan.
- Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan.
 - Tujuan : Meningkatkan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan.
 - Output : Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan persampahan.
 - Realisasi fisik kegiatan sebesar 100%, yaitu:

Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan berupa pembelian pengadaan bak sampah, container sampah, Kendaraan roda 3 dan Pembuatan Tempat Pemilahan Sampah.

(REALISASI KEUANGAN DAN % CAPAIAN KINERJA KEUANGAN)

Alokasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan pada tahun 2020 berjumlah Rp 13.254.950.600,- yang meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp 4.157.772.700,- dan belanja langsung berjumlah Rp. 9.097.177.900,-

Anggaran yang berhasil direalisasikan sebesar Rp. 12.902.307.872 atau sekitar 97,34%. Dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.072.904.828,- dan belanja langsung sebesar Rp. 8.829.403.644,-

Berikut rincian alokasi dan realisasi dana untuk masing-masing kegiatan :

1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

➤ Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat adalah senilai Rp. 16.020.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 pada tahun 2020 sebesar Rp. 16.020.000,- atau sebesar 100%.

➤ Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik adalah senilai Rp. 135.000.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 pada tahun 2020 sebesar Rp. 110.899.947,- atau sebesar 82,15%.

➤ Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor adalah senilai Rp. 52.455.100,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 pada tahun 2020 sebesar Rp. 51.326.500,- atau sebesar 97,85 %.

➤ Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja.

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Penyediaan Jasa Jasa perbaikan peralatan kerja adalah senilai Rp. 12.500.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa serta pemeliharaan. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 pada tahun 2020 sebesar Rp. 8.112.000,- atau sebesar 64,90 %.

➤ Penyediaan alat tulis kantor.

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Penyediaan alat tulis kantor adalah senilai Rp. 52.992.800,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 pada tahun 2020 sebesar Rp. 51.886.800,- atau sebesar 97,91 %.

➤ Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan senilai Rp. 22.067.500,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 pada tahun 2020 sebesar Rp. 12.433.500,- atau sebesar 56,34 %.

➤ Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor senilai Rp. 44.997.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 pada tahun 2020 sebesar Rp. 44.240.200,- atau sebesar 98,32 %.

➤ Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan senilai Rp. 4.000.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 pada tahun 2020 sebesar Rp. 3.975.000,- atau sebesar 99,38 %.

➤ Penyediaan makanan dan minuman

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Penyediaan makanan dan minuman senilai Rp. 8.000.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 pada tahun 2020 sebesar Rp. 6.800.000,- atau sebesar 85 %.

➤ Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah senilai Rp. 729.066.200,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 pada tahun 2020 sebesar Rp. 728.359.680,- atau sebesar 99,90 %.

➤ Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah senilai Rp. 169.293.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 pada tahun 2020 sebesar Rp. 168.590.000,- atau sebesar 99,58 %.

2. Program : Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

➤ Pembangunan gedung kantor.

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pembangunan gedung kantor senilai Rp. 1.008.280.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja modal. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.006.478.600,- atau sebesar 99,82 %.

➤ Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor senilai Rp. 13.200.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 pada tahun 2020 sebesar Rp. 13.000.000,- atau sebesar 98,48 %.

➤ Pengadaan Peralatan Kantor

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pengadaan peralatan kantor senilai Rp. 14.300.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 pada tahun 2020 sebesar Rp. 8.800.000,- atau sebesar 61,54 %.

➤ Pengadaan Meubeleur

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pengadaan meja dan kursi senilai Rp. 8.750.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja modal. Dan realisasi

sampai dengan triwulan 4 pada tahun 2020 sebesar Rp. 8.750.000,- atau sebesar 100 %.

➤ Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor senilai Rp. 64.200.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa serta belanja pemeliharaan. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 pada tahun 2020 sebesar Rp. 64.043.000,- atau sebesar 99,76 %.

➤ Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional senilai Rp. 214.520.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa serta belanja pemeliharaan. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 pada tahun 2020 sebesar Rp. 190.635.504,- atau sebesar 88,87 %.

3. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

➤ Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-Undangan

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-Undangan senilai Rp. 82.500.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 pada tahun 2020 sebesar Rp. 81.250.000,- atau sebesar 98,48 %.

4. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

➤ Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun senilai Rp 55.179.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, belanja cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman serta belanja perjalanan dinas. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 pada tahun 2020 sebesar Rp. 55.063.700,- atau sebesar 99,79 %.

➤ Penyusunan RKA dan DPA SKPD.

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Penyusunan Penyusunan RKA dan DPA SKPD senilai Rp. 40.509.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang

dan jasa, belanja cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman serta belanja perjalanan dinas. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 pada tahun 2020 sebesar Rp. 39.866.100,- atau sebesar 98,41 %.

➤ Penyusunan Dokumen perencanaan SKPD.

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Penyusunan Dokumen perencanaan SKPD senilai Rp. 50.940.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, belanja cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman serta belanja perjalanan dinas. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 pada tahun 2020 sebesar Rp. 48.239.366,- atau sebesar 94,70 %.

5. Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

➤ Pemantauan kualitas lingkungan

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pemantauan kualitas lingkungan senilai Rp. 174.009.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja pegawai, barang dan jasa . Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 pada tahun 2020 sebesar Rp. 167.605.000,- atau sebesar 96,32 %.

➤ Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan senilai Rp. 60.286.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja pegawai, barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 pada tahun 2020 sebesar Rp. 51.496.900,- atau sebesar 85,42 %.

➤ Inventarisasi Kerusakan Lahan

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Inventarisasi Kerusakan Lahan senilai Rp. 20.360.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja pegawai, barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 pada tahun 2020 sebesar Rp. 17.990.000,- atau sebesar 88,36 %.

➤ Operasionalisasi laboratorium lingkungan.

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Operasionalisasi laboratorium lingkungan senilai Rp. 478.000.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa sderta belanja modal. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 pada tahun 2020 sebesar Rp. 468.583.230,- atau sebesar 98,03 %.

- Peningkatan kapasitas dan SDM laboratorium.
Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Peningkatan kapasitas dan SDM laboratorium senilai Rp. 32.412.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 pada tahun 2020 sebesar Rp. 30.140.000,- atau sebesar 92,99 %.

6. Program : Perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.
Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem senilai Rp. 204.250.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 pada tahun 2020 sebesar Rp. 196.027.100,- atau sebesar 95,97 %.

- Program Kampung Iklim (Proklam)
Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Program Kampung Iklim (Proklam) senilai Rp. 30.260.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja pegawai, barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 pada tahun 2020 sebesar Rp. 29.855.000,- atau sebesar 98,66 %.

7. Program : Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

- Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Lingkungan (AMDAL UKL/UPL)
Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Lingkungan (AMDAL UKL/UPL) senilai Rp. 51.840.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 pada tahun 2020 sebesar Rp. 44.351.000,- atau sebesar 85,55 %.
- Fasilitasi penyelesaian pengaduan dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Fasilitasi penyelesaian pengaduan dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup senilai Rp. 81.220.000,- yang

semuanya dialokasikan untuk belanja pegawai, barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 pada tahun 2020 sebesar Rp. 66.730.000,- atau sebesar 82,16 %.

➤ Koodinasi penyusunan dokumen lingkungan.

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Koodinasi penyusunan dokumen lingkungan senilai Rp. 270.895.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 pada tahun 2020 sebesar Rp. 259.077.500,- atau sebesar 95,64 %.

8. Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

➤ Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan senilai Rp. 512.155.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja pegawai, barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 pada tahun 2020 sebesar Rp. 505.595.048,- atau sebesar 98,72 %.

➤ Koordinasi Penilaian kota sehat/adipura.

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Koordinasi Penilaian kota sehat/adipura senilai Rp. 109.200.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja pegawai, barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 pada tahun 2020 sebesar Rp. 104.587.792,- atau sebesar 95,78 %.

➤ Pemeliharaan Alat Angkutan Sampah

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pemeliharaan Alat Angkutan Sampah senilai Rp. 460.470.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 pada tahun 2020 sebesar Rp. 458.959.688,- atau sebesar 99,67 %.

➤ Mengumpulkan dan Mengangkut Sampah dari TPS ke TPA.

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Mengumpulkan dan Mengangkut Sampah dari TPS ke TPA senilai Rp. 2.425.236.500,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja pegawai, barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.406.531.699,- atau sebesar 99,23 %.

➤ Operasionalisasi TPA

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Operasionalisasi TPA senilai Rp. 566.678.300,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 pada tahun 2020 sebesar Rp. 522.675.220,- atau sebesar 92,23 %.

➤ Administrasi Perizinan limbah cair dan B3.

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Administrasi Perizinan limbah cair dan B3 senilai Rp. 66.350.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja pegawai, barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 pada tahun 2020 sebesar Rp. 48.701.000,- atau sebesar 73,40 %.

➤ Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 senilai Rp. 41.275.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja pegawai, barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 pada tahun 2020 sebesar Rp. 39.029.000,- atau sebesar 94,56 %.

➤ Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup.

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup senilai Rp. 36.700.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja pegawai, barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 pada tahun 2020 sebesar Rp. 30.890.000,- atau sebesar 84,17 %.

➤ Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan senilai Rp. 676.811.500,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 pada tahun 2020 sebesar Rp. 661.807.000,- atau sebesar 97,78 %.

Tabel : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100 %		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja		65	65	63.75	98.08%	64		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		1	1	1	100.00%	1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja		1	1	1	100.00%	1		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	100	100	100.00%	100%		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN		14	14	14	100.00%	14		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		1	1	1	100.00%	4		

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah penyusunan laporan keuangan SKPD		1	1	1	100.00%	12		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah		100	100	100	100.00%	100%		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		7	4	3	75.00%	5		
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah barang cetakan dan Pengadaan.		12	12	12	100.00%			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		15	15	15	100.00%	360		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	12	12	100.00%	300		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100	100	100	100.00%	100%		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	12	12	100.00%	10,000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12	12	12	100.00%	12		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12	12	12	100.00%			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12	12	12	100.00%	20		

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100	100	100	100.00%	100%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		12	12	12	100.00%	10		
Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		12	12	12	100.00%	3		
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup		100	100	100	100.00%	100		
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)		1						
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang		100	70	358	511.43%	300		
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		61.35	61.25	65.93	107.64%	67.21		
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota									

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah titik tanah, air dan udara yang di amati		18	25	31	124.00%	30		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Penurunan Emisi GRK (%)						10		
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah parameter sampel yang di uji		20	20	20	100.00%	20		
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota									
Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah penghentian pencemaran/kerusakan lingkungan hidup.		1	1	1	100.00%	1		
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota									
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah rehabilitasi		1	1	1	100.00%	1		
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati						100		

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati						100%		
Pengelolaan Kebun Raya	Jumlah luasan pengelolaan kebun raya		12	12	12	100.00%	10		
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah luasan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		12	12	12	100.00%	3		
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		100	100	100	100.00%	100		
Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Pengawasan Pengendalian B3 dan Limbah B3						100%		
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah verifikasi lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3		10	5	7	140.00%	10		
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengumpulan limbah B3						100%		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah limbah B3 yang dikelola		1	13	52	400.00%	2		

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.		100	100	100	100.00%	100		
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.						100%		
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan usaha/kegiatan yang izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.		12	10	19	190.00%	10		
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH.						100		
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH.								

Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA.	Jumlah MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional yang di verifikasi.						1		
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat						100		
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							2		
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup						2		
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat						100		
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerimaan Penghargaan Lingkungan hidup						100%		

Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam pengelolaan perindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.						5		
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup		100	100	100	100.00%	100		
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup						100%		
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani.		8	2	2	100.00%	5		
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan		76.84	97	71.74	73.96%	99		
Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah Terkelola						99		
Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah pengurangan sampah		10	5000	4712	94.24%	26		

Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan sampah		20	1133	11095	979.26%	73		
Program Pengelolaan Izin Lokasi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi						100%		
Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah						100%		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal Dan Kemudahan Berusaha	Tersedianya data penerbitan Izin Lokasi dalam 1 tahun						100%		
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Terfasilitasinya Penanganan Permasalahan Permasalahan Pertanahan						100%		
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pemahaman akan tertibnya administrasi pertanahan						100%		
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah garapan dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Penanganan Permasalahan Pertanahan Di Daerah						8		
Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Terselenggaranya redistribusi objek reforma agraria						100		

Penetapan Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah	Meningkatnya legalitas kepemilikan tanah masyarakat						100%		
Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Teralisasinya redistribusi tanah objek reforma agraria						100%		
Program Pengelolaan Izin membuka Tanah	Penyusunan dasar hukum pemberian IMT dan prosentase meningkatnya luas lahan bersertifikat di daerah						100		
Penerbitan Izin Membuka Tanah	Tersusunnya draft awal Perda IMT dan meningkatnya kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah						100%		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Terhimpunnya bahan penyusunan dasar hukum IMT						100%		
Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Terdaftarnya permohonan hak di Kantor Pertanahan						20		
Program Penatagunaan Tanah	Meningkatnya penataan tanah daerah						100%		
Penggunaan Tanah yang Hamparanya dalam 1 daerah kabupaten/Kota	Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam 1 daerah kabupaten/kota						100%		

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah						100%		
--	--	--	--	--	--	--	------	--	--

2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

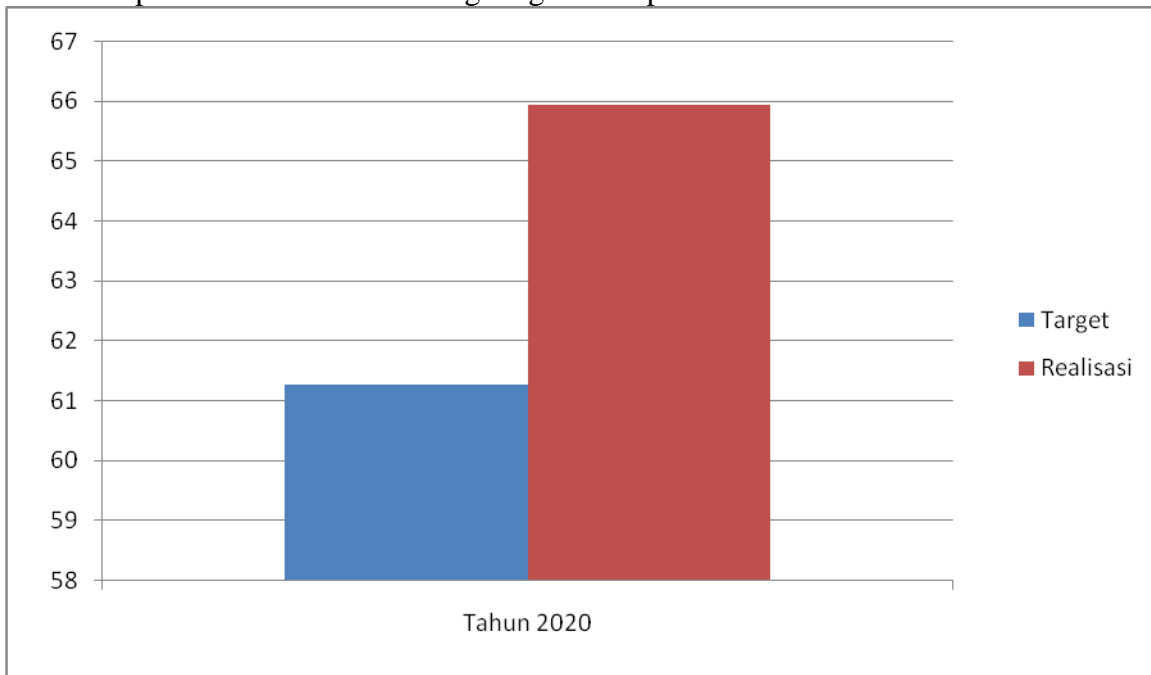
Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD	Realisasi Capaian	Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2020	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	-	61,25	65,93	

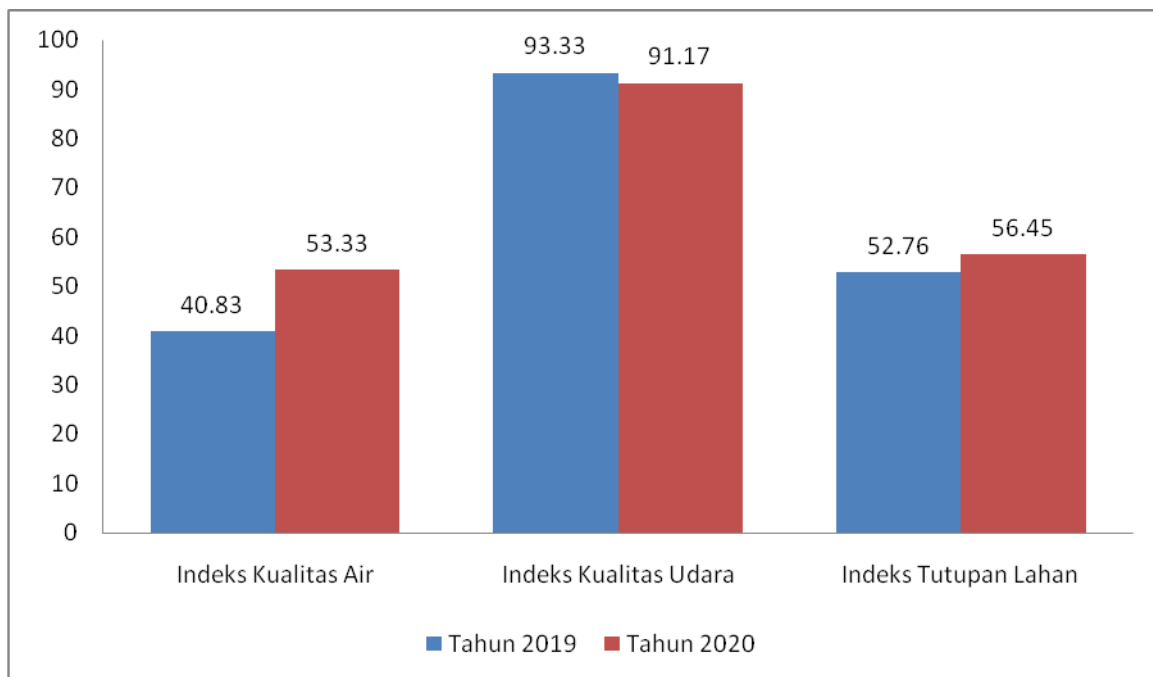
Total rata – rata capaian strategis sasaran 1 (satu) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup pada Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 107,64 % sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan sangat memuaskan.

Secara ringkas, target dan realisasi kinerja berdasarkan indikator kinerja Utama (IKU) di gambarkan pada grafik berikut :

Skor Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020.



Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020



Perbandingan Realisasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.

Perbandingan data IKLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan dengan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

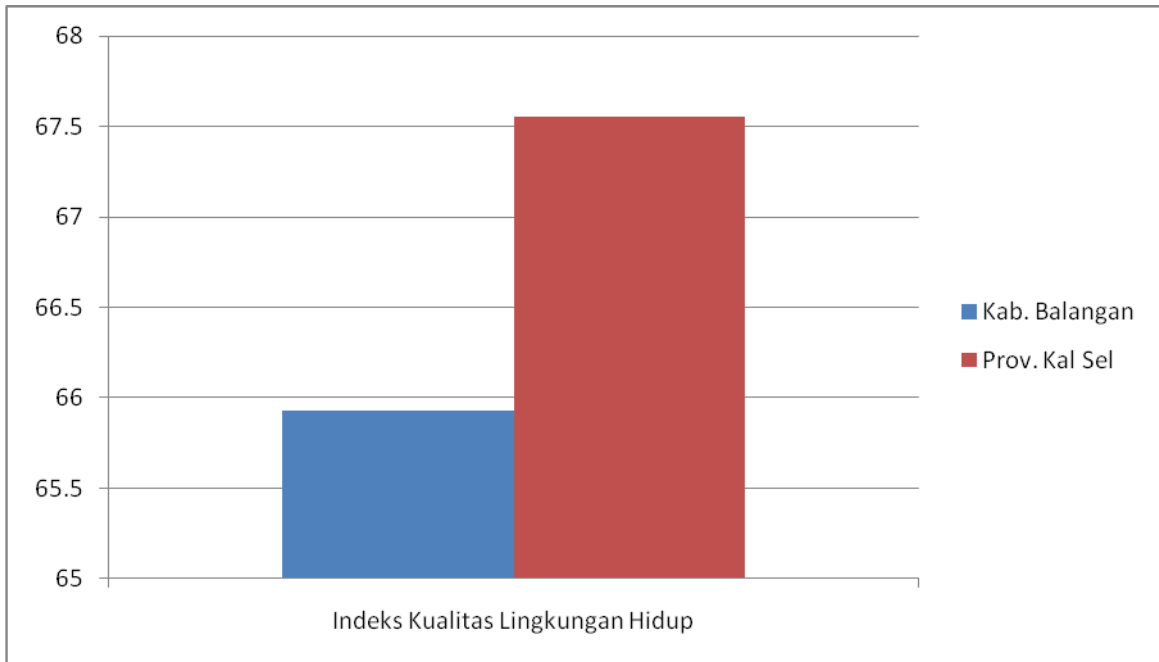
Tabel. Data IKLH Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,55	67,55	100%

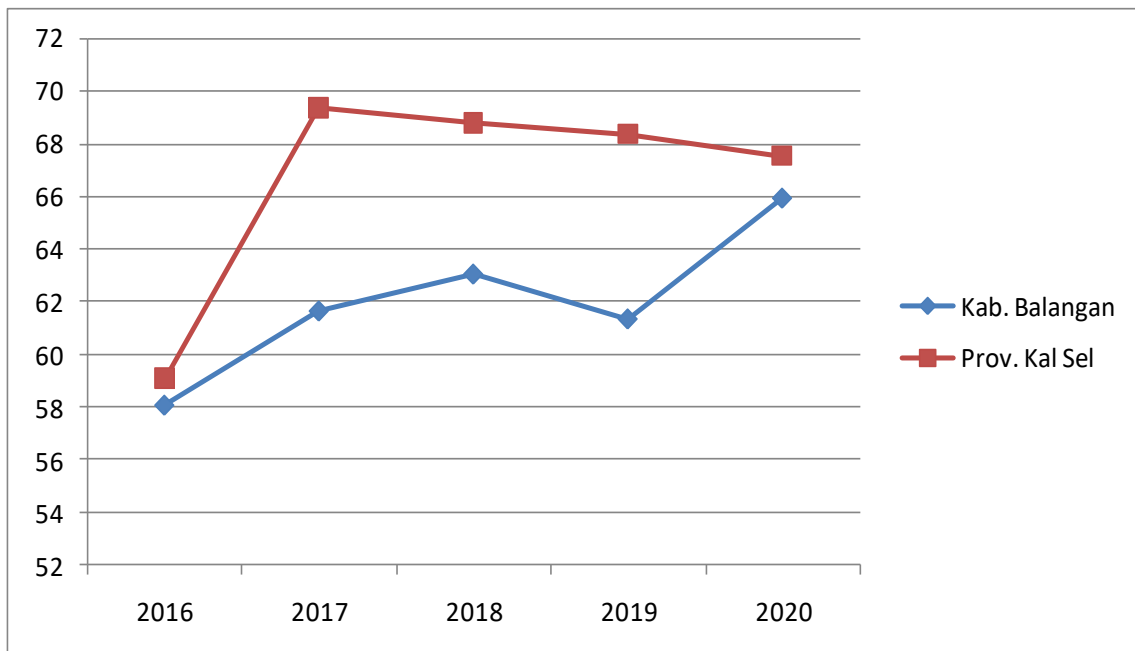
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel. Data IKLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya Mutu Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,25	65,93	105,9 %



Gambar : Perbandingan IKLH Kabupaten dan Provinsi.



Gambar : Tren IKLH Kabupaten dan Provinsi

IKLH sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia merupakan perpaduan antara konsep IKL dan konsep EPI. IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Nilai IKLH merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional, yang merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh provinsi di Indonesia. Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah : (1) Kualitas Air, yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform; (2) Kualitas udara, yang diukur berdasarkan parameter-parameter: SO_2 dan NO_2 ; dan (3) Kualitas tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

1. Indeks Kualitas Air

- a. Air sungai merupakan sumber kegiatan masyarakat Kabupaten Balangan, sehingga air sungai tetap terjaga dari hulu sampai hilir.
- b. Tingkat pengawasan terhadap kegiatan/tempat usaha baik perusahaan besar maupun kecil selalu dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Balangan.
- c. Perijinan pembuangan air limbah dari perusahaan tambang batu bara selalu melalui kajian, sehingga pemberian ijin sesuai dengan daya tampung sungai Kabupaten Balangan.

Pemantauan kualitas air sungai di Kabupaten Balangan, dilakukan di 2 sungai, yakni sungai Balangan dan sungai Pitap. Kegiatan pemantauan sungai di Kabupaten Balangan ditetapkan sebanyak 12 (dua belas) titik sampling dengan waktu sampling yang dilakukan 4 (empat) kali dalam setahun dan 1 titik sampling pada danau yang dilakukan 2 kali dalam setahun.

Tabel. Perhitungan Indeks Kualitas Air

No	Status	Jumlah	Persen	Bobot	Nilai
1	Memenuhi	4	0,17	70	11,67
2	Ringan	20	0,83	50	41,67
3	Sedang	0	0,00	30	15,00
4	Berat	0	0,00	10	0,00
		24	1,00		53,33

Tabel 2 menunjukkan data status pencemaran pada setiap titik pantau disungai Balangan pada tahun 2020, berdasarkan data tersebut terlihat bahwa pada titik pantau sungai Balangan memiliki 4 status memenuhi dan 20 status cemar ringan. Dari hasil perhitungan pada table 3 diatas, diperoleh nilai Indeks Kualitas Air (**IKA**) di Kabupaten Balangan pada tahun 2020 sebesar **53,33 (kategori cemar ringan)**. Nilai IKA pada tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan nilai IKA di tahun 2019 yaitu 40,33 (kategori cemar sedang).

2. Indeks Kualitas Udara.

Kualitas udara ambient di Kabupaten Balangan sangat dipengaruhi oleh kegiatan transportasi. Sumber pencemaran udara perkotaan berasal dari sumber bergerak yang sangat dipengaruhi oleh kandungan bahan bakar dan pembakaran mesin. Polutan yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor berupa senyawa CO, HC, SO₂, NO₂ dan partikulat.

Untuk mengetahui kualitas udara, maka perlunya dilakukan pemantauan kualitas udara. Pemantauan kualitas udara dapat dilakukan dengan metode sesaat dan metode Passive Sampler. Sementara itu, untuk mendapatkan data IKU, metode yang dilakukan yakni dengan menggunakan Passive Sampler. Passive Sampler merupakan program yang dilaksanakan oleh Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Balangan sebagai pelaksana teknis dilapangan, sedangkan untuk pengujian parameter, diserahkan kepada Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara.

Pemantauan udara dengan metode Passive Sampler dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari berturut-turut. Kegiatan ini dilakukan selama 2 (dua) kali dalam setahun, dan pada tahun 2019 dilaksanakan pada bulan April - Mei (tahap I) dan pada bulan Agustus (tahap II). Pemantauan kualitas udara di Kabupaten Balangan dilakukan pada 4 (empat) titik lokasi :

1. Kawasan Perkantoran
(S 02°21'39,2" E 115°28'15,5")
2. Kawasan Permukiman
(S 02°19'54,6" E 115°27'48,9")
3. Kawasan Industri
(S 02°17'48,6" E 115°28'31,1")
4. Kawasan Padat Transportasi
(S 02°20'11,0" E 115°27'33,3")

Parameter yang dianalisa sebagai data IKU yaitu **NO₂** dan **SO₂**

Tabel 4. Kategori IKU

Kriteria	Kisaran Angka
Unggul	$X > 90$
Sangat baik	$82 < X \leq 90$
Baik	$74 < X \leq 82$
Cukup	$66 \leq X \leq 74$
Kurang	$58 \leq X < 66$
Sangat Kurang	$50 \leq X < 58$
Waspada	$X < 50$

Dalam menghitung rerata parameter NO₂ dan SO₂ dari tiap periode pemantauan untuk masing-masing lokasi (titik), maka akan didapat data rerata untuk

area transportasi (A), industri (B) dan 2 (dua) titik di area komersial, yaitu dalam hal ini perumahan (C1) dan perkantoran/ perdagangan (C2).

$$IPU = \frac{IP_{NO_2} + IP_{SO_2}}{2}$$

IPNO₂ = Indeks Pencemar NO₂

IPSO₂ = Indeks Pencemar SO₂

Selanjutnya, dilakukan perhitungan indeks kualitas udara model EU, yaitu membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar EU Directives, apabila angkanya melebihi 1 (satu) maka berarti melebihi standar EU, begitu pula sebaliknya apabila sama dan dibawah 1 (satu) artinya memenuhi standar dan lebih baik.

Rata-rata hasil pemantauan untuk parameter SO₂ dan NO₂ dibandingkan dengan Referensi EU mendapatkan Index Udara Model (Ieu). Index Udara model EU dikonversikan menjadi indeks IKLH melalui persamaan sebagai berikut :

$$\text{Indekskualitas udara} = 100 - \{50 / 0.9 \times ieu - 0.1\}$$

Tabel 7. Perhitungan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Balangan Tahun 2019

No	Parameter	Rerata Pemantauan Tahun 2019	Baku Mutu	Index
1.	SO ₂	5,19	20	0,26
2.	NO ₂	10,33	40	0,26
Index Udara (Index Udara model EU-Ieu)				0,26
Index Kualitas Udara 2019 IKLH*				91,17

$$*\text{Indekskualitas udara} = 100 - \{50 / 0.9 \times (ieu - 0.1)\}$$

Angka rata-rata NO₂ dan SO₂ kabupaten dibandingkan dengan Referensi EU akan didapatkan Index Udara model EU (IEU) atau indeks antara sebelum dinormalisasikan pada indeks IKLH. Index Udara model EU dikonversikan menjadi indeks IKLH maka dengan ini dapat di simpulkan bahwa untuk **Indeks Kualitas Udara (IKU)** Kabupaten Balangan tahun 2020 adalah **91,17** (Unggul).

2. Indeks Tutupan Hutan.

Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem, Hutan berfungsi sebagai penjaga air, mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim, dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah, Berdasarkan klasifikasinya, hutan terbagi menjadi hutan primer dan hutan sekunder, Hutan primer adalah hutan yang belum mengalami gangguan, sedangkan hutan sekunder adalah hutan yang tumbuh melalui suksesi sekunder alami setelah mengalami gangguan seperti pertambangan, perkebunan, dan pertanian,

Untuk menghitung indeks tutupan hutan yang pertama kali dilakukan adalah menjumlahkan luas hutan primer dan hutan sekunder, kemudian dibagi dengan luas wilayah Kabupaten.

$$TH = \frac{LTH}{LWK}$$

Keterangan:

TH : Tutupan Hutan

LTH : Luas Tutupan ber-Hutan

LWK : Luas Wilayah Kabupaten

Selanjutnya, dilakukan konversi berdasarkan persamaan berikut:

$$ITH = 100 - \left((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

Berdasarkan Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/255/Kum Tahun 2016 tentang Luas Wilayah Administratif Kabupaten Balangan, luas wilayah administratif Kabupaten Balangan adalah 1.828,11 km² atau 182.811 ha. Untuk data Luas Tutupan ber-Hutan diperoleh berdasarkan data inventarisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalimantan Selatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Balangan beserta sumber-sumber data lainnya. Perhitungan tutupan hutan Balangan:

$$TH = \frac{LTH}{LWK}$$

$$TH = \frac{673,53}{1.828,11} = \mathbf{0,37}$$

$$\begin{aligned}
 \text{ITH} &= 100 - \left((84,3 - (\text{TH} \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right) \\
 \text{ITH} &= 100 - \left((84,3 - (0,37 \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right) \\
 &= 56,45
 \end{aligned}$$

Berdasarkan data statistik dari Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalimantan Selatan, Penutupan Lahan 2017 KLHK dan Badan Informasi Geospasial, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 8. Tutupan Hutan Kabupaten Balangan Tahun 2020

Komponen	Nilai (Ha)
Ruang Terbuka Hijau	119,11
Hutan Lahan Kering Primer	10.276
Hutan Lahan Kering Sekunder	36.287
Hutan Tanaman	2.997
Belukar dalam kawasan	15.993
Belukar luar kawasan	1.681
Luas Tutupan berhutan	673,53
Luas Wilayah Kabupaten	1.828,11
Tutupan Hutan	0,37

Nilai Tutupan Hutan tersebut kemudian dikonversi, sehingga diperoleh nilai Indeks Tutupan Hutan Kabupaten Balangan tahun 2020 sebesar **56,45**.

Permasalahan/Hambatan

Beberapa permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan antara lain:

1. Kurangnya tenaga teknis pemantauan terhadap kualitas air, udara, dan tenaga peng analisis kualitas lingkungan hidup;
2. Kurangnya koordinasi Tim Adipura, sehingga perlunya koordinasi secara intensif Tim Adipura Kabupaten;

3. Kurangnya dukungan dari dinas terkait dalam program adiwiyata sehingga sekolah-sekolah yang diusulkan masih dirasa kurang baik materi pendidikan maupun sarpras yang ramah lingkungan;
4. Masih terbatasnya pengetahuan tentang pemanfaatan (3R) dalam mereduksi sampah di masyarakat dan perkantoran sehingga jumlah nasabah bank sampah masih kurang;
5. Belum maksimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lahan dikarenakan kurangnya personil serta anggaran yang tidak memadai;
6. Jumlah personil dan banyaknya obyek pengawasan yang tidak sebanding;
7. Peralatan pengawasan serta pemantauan yang belum maksimal;
8. Belum maksimalnya pengetahuan perusahaan tentang kewajiban pengelolaan lingkungan hidup;
9. Perbedaan persepsi terhadap peraturan limbah B3 di perusahaan antara pemerintah pusat dan daerah serta perusahaan, sehingga menimbulkan permasalahan di lapangan;
10. Sulitnya pengawasan terhadap perusahaan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Provinsi maupun pusat, sehingga pengawasan lingkungan di dunia usaha tidak berjalan optimal;
11. Belum semua bagian dari Undang-undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki turunan;
12. Kurang sosialisasi mengenai peraturan bidang lingkungan hidup oleh Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah, sehingga menyulitkan pelaksanaan pengawasan penataan lingkungan;
13. Jumlah personil Pegawai Negeri Sipil yang memahami proses penilaian dokumen AMDAL dan pemeriksa UKL-UPL yang terbatas;
14. Masih kurangnya peralatan dan sarana penunjang operasional laboratorium lingkungan;

15. Jenis pelatihan yang dipersyaratkan untuk personel lab masih ada yang belum terpenuhi;
16. Kesulitan mendapatkan data terbaru dari instansi terkait. Selain itu kadang terdapat perbedaan data untuk objek yang sama;
17. Keterbatasan SDM yang menguasai Sistem Informasi Geografis.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

1. Diperlukan tambahan tenaga teknis untuk pemantauan kualitas air, udara dan tenaga penganalisis data lingkungan;
2. Adanya upaya meningkatkan SDM penilai adipura yang baru karena untuk menjadi Tim Adipura harus memiliki sertifikat Penilai Adipura;
3. Lebih ditingkatkan edukasi dan sosialisasi tentang program bank sampah (3R);
4. Melakukan koordinasi tentang instrumen tata cara pengawasan sesuai dengan perundang-undangan;
5. Melakukan pengawasan bersama pengendalian pencemaran;
6. Rekrutmen tenaga ahli dan usulan penambahan staf;
7. Melakukan usulan pengadaan peralatan pengawasan;
8. Sosialisasi peraturan perundangan tentang kewajiban dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup;
9. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan daerah tentang kebijakan mengenai pengelolaan limbah B3;
10. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat selaku penerbit izin pengumpul limbah B3 dan transporter limbah B3;
11. Melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota untuk pengawasan bersama;
12. Mendorong Pemerintah Pusat untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009;

13. Penambahan Pegawai Negeri Sipil dan Pelatihan/ Diklat Penilai AMDAL;
14. Rapat koordinasi bersama kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD;
15. Perlu adanya pembinaan yang lebih intensif dari Provinsi dan Pusarpedal juga adanya komitmen Kepala Perangkat Daerah di 13 kabupaten/kota agar laboratorium yang ada dapat berjalan dengan baik dan juga dapat mempertahankan status akreditasi;
16. Mengadakan peralatan dan sarana penunjang untuk operasional laboratorium lingkungan;
17. Memenuhi pelatihan yang dipersyaratkan untuk kualifikasi masing-masing personel laboratorium;
18. Lebih mengintensifkan koordinasi dengan perangkat daerah baik provinsi maupun kabupaten;
19. Diharapkan dengan lebih melatih SDM yang ada dan jika memungkinkan menambah personil yang menguasai GIS.

Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja

Indikator	2019	2020			Capaian 2020 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Nilai/ Predikat Akuntabilitas Kinerja	B	B	*	*	*
Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang di Tindaklanjuti.	100%	100%	*	*	*
Rata-rata Capaian				*	*

Untuk sasaran 2 (dua) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja pada Indikator Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja dan Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang di Tindaklanjuti hal ini dikarenakan masih tahap verifikasi dari Inspektorat Kabupaten Balangan sehingga nilai/angka belum dikeluarkan.

C. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan pada tahun 2020 berjumlah Rp 13.254.950.600,- yang meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp 4.157.772.700,- dan belanja langsung berjumlah Rp. 9.097.177.900,-

Anggaran yang berhasil direalisasikan sebesar Rp. 12.902.307.872,- atau sekitar 97,34%. Dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.072.904.828,- dan belanja langsung sebesar Rp. 8.829.403.644,- .Rincian capaian kinerja dan anggaran di tahun 2020 sebagai berikut:

Sasaran	Anggaran		
	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.	13.254.950.600,-	12.902.307.872,-	97,34

D. Analisis Efisiensi

Sasaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.	17,64 %	12.902.307.872,-	Efisiensi

3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu strategi berdasarkan RPJMD Kabupaten Balangan antara lain sebagai berikut:

a. Menurunnya indeks kualitas lingkungan hidup

Berdasarkan isu strategis untuk Dinas Lingkungan Hidup yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 tersebut diatas bila dibandingkan dengan kondisi yang ada, maka untuk menangani isu strategis tersebut perlu diketahui adanya kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang mungkin timbul sebagai berikut:

1. Kekuatan

- Komitmen Pimpinan;
- Regulasi, seperti peraturan perundangan termasuk baku mutu yang telah ditetapkan terutama dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Potensi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ditandai dengan adanya sertifikat;
- Adanya perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk standardisasi meliputi pengujian, kompetensi personil, sistem manajemen lingkungan, dan ecolabel;
- Adanya program-program inovatif yang telah dihasilkan seperti, Adipura, Adiwiyata, Menuju Indonesia Hijau, Eco-Office, dll.
- Kelembagaan;
- Kebijakan operasional;

2. Kelemahan

- Keterbatasan sarana dan prasarana kerja;
- Keterbatasan jumlah sumber daya manusia;
- Keterbatasan anggaran yang tidak sebanding dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup;
- Keterbatasan *databases*serta informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

3. Peluang

- Koordinasi dan konsultasi;
- Isu lingkungan telah menjadi isu global;
- Kerjasama dengan instansi terkait;
- Kearifan lokal;
- Adanya perkembangan kapasitas organisasi masyarakat dan organisasi nonpemerintah;
- Tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang baik.

4. Tantangan

- Isu lingkungan belum menjadi suatu peluang untuk pembangunan ekonomi;
- Berbagai bencana alam
- Kemiskinan
- Adanya Kepala Daerah yang masih lemah dengan penerapan komitmen pelestarian lingkungan hidup;
- Peningkatan sistem penegakan hukum;
- Pelaksanaan otonomi daerah yang tidak tepat sehingga memicu konflik pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam baik antarwilayah, antarpusat dan daerah, serta antarpenggunaan.
- Kepedulian masyarakat dan dunia usaha yang masih perlu ditingkatkan dengan membiasakan perilaku yang ramah lingkungan.

Berdasarkan isu strategis RPJMD dan kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan di atas menjadi landasan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan untuk membuat perumusan isu-isu strategis sebagai berikut:

- a. Cakupan Penanganan Sampah
- b. Menurunnya indeks kualitas lingkungan hidup

- c. Penurunan kualitas dan kuantitas air sungai sebagai sumber air bersih dan adanya intrusi air laut.
- d. Peningkatan polusi udara akibat kebakaran hutan dan lahan serta emisi gas buang kendaraan bermotor daerah perkotaan.
- e. Kurangnya tutupan lahan berupa vegetasi hijau;
- f. Permasalahan efek Gas Rumah Kaca
- g. Banjir dan longsor
- h. Meningkatnya kerugian Negara akibat hak-hak Negara dan rakyat yang hilang dalam pemanfaatan SDA dan LH oleh kelompok masyarakat atau pelaku usaha/kegiatan.
- i. Belum optimalnya upaya konservasi SDA;
- j. Terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang.
- k. Belum optimalnya penataan peraturan dan perundangan LH oleh stakeholder (pelaku usaha) dan masyarakat;
- l. Berkurangnya daerah tangkapan air;
- m. Permasalahan sosial kemasyarakatan sehingga perlu perencanaan sosial yang baik dalam penguatan partisipasi masyarakat.

4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 berdasarkan program dan kegiatan yang telah termuat dalam Renstra tahunan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Balangan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1,070,232,860.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Balangan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1,070,232,860.00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja	64	86,670,460.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja	64	86,670,460.00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1	45,130,460.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1	45,130,460.00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Balangan	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1	41,540,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Balangan	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1	41,540,000.00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	69,860,000.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	69,860,000.00
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Balangan	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Balangan	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14	-
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Balangan	Jumlah penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	4	33,890,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Balangan	Jumlah penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	4	33,890,000.00
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Balangan	Jumlah penyusunan laporan keuangan SKPD	12	35,970,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Balangan	Jumlah penyusunan laporan keuangan SKPD	12	35,970,000.00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Persentase administrasi umum perangkat daerah	100%	403,120,400.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Persentase administrasi umum perangkat daerah	100%	403,120,400.00

7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Balangan	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	10,000,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Balangan	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	10,000,000.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Kab. Balangan			14,720,400.00	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Kab. Balangan			14,720,400.00
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Balangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	360	8,400,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Balangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	360	8,400,000.00
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300	370,000,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300	370,000,000.00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Balangan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	279,722,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Balangan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	279,722,000.00
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Balangan	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000	34,200,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Balangan	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000	34,200,000.00
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Balangan	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	120,000,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Balangan	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	120,000,000.00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Balangan	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		7,000,000.00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Balangan	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		7,000,000.00
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Balangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20	118,522,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Balangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20	118,522,000.00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Balangan	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	230,860,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Balangan	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	230,860,000.00
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Balangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10	188,620,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Balangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10	188,620,000.00

14	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Balangan	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	42,240,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Balangan	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	42,240,000.00
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Balangan	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup	100	213,000,000.00	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Balangan	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup	100	213,000,000.00
7	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)		213,000,000.00	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)		213,000,000.00
15	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Kab. Balangan	Jumlah Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	300	213,000,000.00	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Kab. Balangan	Jumlah Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	300	213,000,000.00
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Balangan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67.21	715,000,000.00	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Balangan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67.21	715,000,000.00
8	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Balangan			615,000,000.00	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Balangan			615,000,000.00
16	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Balangan	Jumlah titik tanah, air dan udara yang di amati	30	150,000,000.00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Balangan	Jumlah titik tanah, air dan udara yang di amati	30	150,000,000.00
17	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Balangan	Penurunan Emisi GRK (%)	10	50,000,000.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Balangan	Penurunan Emisi GRK (%)	10	50,000,000.00
18	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah parameter sampel yang di uji	20	415,000,000.00	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah parameter sampel yang di uji	20	415,000,000.00
9	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Balangan			50,000,000.00	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Balangan			50,000,000.00

19	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Balangan	Jumlah penghentian pencemaran/kerusakan lingkungan hidup.	1	50,000,000.00	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Balangan	Jumlah penghentian pencemaran/kerusakan lingkungan hidup.	1	50,000,000.00
10	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Balangan			50,000,000.00	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Balangan			50,000,000.00
20	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kab. Balangan	Jumlah rehabilitasi	1	50,000,000.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kab. Balangan	Jumlah rehabilitasi	1	50,000,000.00
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kab. Balangan	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	100	1,890,985,140.00	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kab. Balangan	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	100	1,890,985,140.00
11	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	100%	1,890,985,140.00	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	100%	1,890,985,140.00
21	Pengelolaan Kebun Raya	Kab. Balangan	Jumlah luasan pengelolaan kebun raya	10	300,000,000.00	Pengelolaan Kebun Raya	Kab. Balangan	Jumlah luasan pengelolaan kebun raya	10	300,000,000.00
22	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Balangan	Jumlah luasan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3	1,590,985,140.00	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Balangan	Jumlah luasan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3	1,590,985,140.00
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kab. Balangan	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100	100,000,000.00	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kab. Balangan	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100	100,000,000.00
12	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Balangan	Persentase Pengawasan Pengendalian B3 dan Limbah B3	100%	52,300,000.00	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Balangan	Persentase Pengawasan Pengendalian B3 dan Limbah B3	100%	52,300,000.00
23	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Balangan	Jumlah verifikasi lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	10	52,300,000.00	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Balangan	Jumlah verifikasi lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	10	52,300,000.00
13	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase pengumpulan limbah B3	100%	47,700,000.00	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase pengumpulan limbah B3	100%	47,700,000.00

24	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Kab. Balangan	Jumlah limbah B3 yang dikelola	2	47,700,000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Kab. Balangan	Jumlah limbah B3 yang dikelola	2	47,700,000.00
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kab. Balangan	Persentase pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.	100	50,000,000.00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kab. Balangan	Persentase pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.	100	50,000,000.00
14	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.	100%	50,000,000.00	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.	100%	50,000,000.00
25	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah pengawasan usaha/kegiatan yang izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.	10	50,000,000.00	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah pengawasan usaha/kegiatan yang izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.	10	50,000,000.00
7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Kab. Balangan	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH.	100	35,325,000.00	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Kab. Balangan	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH.	100	35,325,000.00
15	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kab. Balangan	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH.	100%	35,325,000.00	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kab. Balangan	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH.	100%	35,325,000.00

26	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA.	Kab. Balangan	Jumlah MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional yang di verifikasi.	1	35,325,000.00	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA.	Kab. Balangan	Jumlah MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional yang di verifikasi.	1	35,325,000.00
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Balangan	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100	35,000,000.00	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Balangan	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100	35,000,000.00
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan		2	35,000,000.00	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan		2	35,000,000.00
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab. Balangan	Jumlah Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	2	35,000,000.00	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab. Balangan	Jumlah Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	2	35,000,000.00
8	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Balangan	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100	115,650,000.00	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Balangan	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100	115,650,000.00
16	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase Penerimaan Penghargaan Lingkungan hidup	100%	115,650,000.00	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase Penerimaan Penghargaan Lingkungan hidup	100%	115,650,000.00
27	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Balangan	Jumlah penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam pengelolaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	5	115,650,000.00	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Balangan	Jumlah penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam pengelolaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	5	115,650,000.00

9	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Balangan	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100	55,000,000.00	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Balangan	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100	55,000,000.00
17	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%	55,000,000.00	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%	55,000,000.00
28	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani.	5	55,000,000.00	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani.	5	55,000,000.00
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kab. Balangan	Persentase Pengelolaan Persampahan	99	3,219,820,000.00	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kab. Balangan	Persentase Pengelolaan Persampahan	99	3,219,820,000.00
18	Pengelolaan Sampah	Kab. Balangan	Persentase Sampah Terkelola	99	3,219,820,000.00	Pengelolaan Sampah	Kab. Balangan	Persentase Sampah Terkelola	99	3,219,820,000.00
30	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kab. Balangan	Jumlah pengurangan sampah	26	550,000,000.00	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kab. Balangan	Jumlah pengurangan sampah	26	550,000,000.00
31	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah penanganan sampah	73	2,669,820,000.00	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah penanganan sampah	73	2,669,820,000.00
	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Kab. Balangan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi	100%	12,200,000.00	Pengelolaan Izin Lokasi	Kab. Balangan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi	100%	12,200,000.00
	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Meningkatnya kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%	12,200,000.00	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Meningkatnya kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%	12,200,000.00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal Dan Kemudahan Berusaha	Kab. Balangan	Tersedianya data penerbitan Izin Lokasi dalam 1 tahun	100%	12,200,000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal Dan Kemudahan Berusaha	Kab. Balangan	Tersedianya data penerbitan Izin Lokasi dalam 1 tahun	100%	12,200,000.00
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Kab. Balangan	Terfasilitasinya Penanganan Permasalahan Permasalahan Pertanahan	100%	46,740,000.00	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Kab. Balangan	Terfasilitasinya Penanganan Permasalahan Permasalahan Pertanahan	100%	46,740,000.00

	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Meningkatnya pemahaman akan tertibnya administrasi pertanahan	100%	46,740,000.00	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Meningkatnya pemahaman akan tertibnya administrasi pertanahan	100%	46,740,000.00
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah garapan dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	Kab. Balangan	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Penanganan Permasalahan Pertanahan Di Daerah	8	46,740,000.00	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah garapan dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	Kab. Balangan	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Penanganan Permasalahan Pertanahan Di Daerah	8	46,740,000.00
	Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Kab. Balangan	Terselenggaranya redistribusi objek reforma agraria	100	3,600,000.00	Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Kab. Balangan	Terselenggaranya redistribusi objek reforma agraria	100	3,600,000.00
	Penetapan Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah	Kab. Balangan	Meningkatnya legalitas kepemilikan tanah masyarakat	100%	3,600,000.00	Penetapan Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah	Kab. Balangan	Meningkatnya legalitas kepemilikan tanah masyarakat	100%	3,600,000.00
	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Teralisasinya redistribusi tanah objek reforma agraria	100%	3,600,000.00	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Teralisasinya redistribusi tanah objek reforma agraria	100%	3,600,000.00
	Program Pengelolaan Izin membuka Tanah	Kab. Balangan	Penyusunan dasar hukum pemberian IMT dan prosentase meningkatnya luas lahan bersertifikat di daerah	100	220,460,000.00	Program Pengelolaan Izin membuka Tanah	Kab. Balangan	Penyusunan dasar hukum pemberian IMT dan prosentase meningkatnya luas lahan bersertifikat di daerah	100	220,460,000.00
	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Kab. Balangan	Tersusunnya draft awal Perda IMT dan meningkatnya kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah	100%	220,460,000.00	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Kab. Balangan	Tersusunnya draft awal Perda IMT dan meningkatnya kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah	100%	220,460,000.00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Kab. Balangan	Terhimpunnya bahan penyusunan dasar hukum IMT	100%	71,480,000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Kab. Balangan	Terhimpunnya bahan penyusunan dasar hukum IMT	100%	71,480,000.00
	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Kab. Balangan	Terdافتarnya permohonan hak di Kantor Pertanahan	20	148,980,000.00	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Kab. Balangan	Terdافتarnya permohonan hak di Kantor Pertanahan	20	148,980,000.00
	Program Penatagunaan Tanah	Kab. Balangan	Meningkatnya penataan tanah daerah	100%	16,987,000.00	Program Penatagunaan Tanah	Kab. Balangan	Meningkatnya penataan tanah daerah	100%	16,987,000.00
	Penggunaan Tanah yang Hamparanya dalam 1 daerah kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam 1 daerah kabupaten/kota	100%	16,987,000.00	Penggunaan Tanah yang Hamparanya dalam 1 daerah kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam 1 daerah kabupaten/kota	100%	16,987,000.00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kab. Balangan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	100%	16,987,000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kab. Balangan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	100%	16,987,000.00

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan empat pilar pembangunan nasional yang diterjemahkan kedalam tujuh agenda pembangunan yang didalamnya terdapat program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas nasional. Ketujuh agenda pembangunan dimaksud yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Program/Kegiatan Prioritas.

Program yang dilaksanakan antara lain:

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- f. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kerafina Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH.
- g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
- h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- i. Program Pengelolaan Persampahan/

2. Tujuan dan Sasaran Renja .

1. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai sampai tahun 2022 adalah Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

2. Sasaran

Sasaran yang akan di capai tahun 2022 adalah Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup.

Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Pada Rencana Kerja Anggaran Tahun 2022, program yang akan dilaksanakan sebanyak 10 program, 17 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan. Dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 7.800.000.000,- Berdasarkan kebijakan nasional dan sasaran utama pembangunan nasional, maka ditetapkan beberapa program dan kegiatan prioritas seperti pada Tabel 7.

Tabel . Program dan Kegiatan Prioritas Pendukung Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Target Kinerja	Anggaran
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup	100	213,000,000.00
			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)		213,000,000.00
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	300	213,000,000.00
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67.21	715,000,000.00
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			615,000,000.00
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah titik tanah, air dan udara yang di amati	30	150,000,000.00
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Penurunan Emisi GRK (%)	10	50,000,000.00
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah parameter sampel yang di uji	20	415,000,000.00
			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			50,000,000.00
			Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah penghentian pencemaran/kerusakan lingkungan hidup.	1	50,000,000.00
			Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			50,000,000.00
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah rehabilitasi	1	50,000,000.00

			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	100	1,890,985,140.00
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	100%	1,890,985,140.00
			Pengelolaan Kebun Raya	Jumlah luasan pengelolaan kebun raya	10	300,000,000.00
			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah luasan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3	1,590,985,140.00
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100	100,000,000.00
			Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Pengawasan Pengendalian B3 dan Limbah B3	100%	52,300,000.00
			Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah verifikasi lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	10	52,300,000.00
			Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengumpulan limbah B3	100%	47,700,000.00
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah limbah B3 yang dikelola	2	47,700,000.00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.	100	50,000,000.00
			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.	100%	50,000,000.00
			Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan usaha/kegiatan yang izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.	10	50,000,000.00

			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH.	100	35,325,000.00
			Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH.	100%	35,325,000.00
			Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA.	Jumlah MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional yang di verifikasi.	1	35,325,000.00
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100	35,000,000.00
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		2	35,000,000.00
			Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	2	35,000,000.00
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100	115,650,000.00
			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerimaan Penghargaan Lingkungan hidup	100%	115,650,000.00
			Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam pengelolaan perlingunda dan pengelolaan lingkungan hidup.	5	115,650,000.00
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100	55,000,000.00
			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%	55,000,000.00
			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani.	5	55,000,000.00

			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan	99	3,219,820,000.00
			Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah Terkelola	99	3,219,820,000.00
			Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah pengurangan sampah	26	550,000,000.00
			Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan sampah	73	2,669,820,000.00
			Program Pengelolaan Izin Lokasi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi	100%	12,200,000.00
			Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%	12,200,000.00
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal Dan Kemudahan Berusaha	Tersedianya data penerbitan Izin Lokasi dalam 1 tahun	100%	12,200,000.00
			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Terfasilitasinya Penanganan Permasalahan Permasalahan Pertanahan	100%	46,740,000.00
			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pemahaman akan tertibnya administrasi pertanahan	100%	46,740,000.00
			Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah garapan dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Penanganan Permasalahan Pertanahan Di Daerah	8	46,740,000.00
			Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Terselenggaranya redistribusi objek reforma agraria	100	3,600,000.00
			Penetapan Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah	Meningkatnya legalitas kepemilikan tanah masyarakat	100%	3,600,000.00
			Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Teralisasinya redistribusi tanah objek reforma agraria	100%	3,600,000.00

			Program Pengelolaan Izin membuka Tanah	Penyusunan dasar hukum pemberian IMT dan prosentase meningkatnya luas lahan bersertifikat di daerah	100	220,460,000.00
			Penerbitan Izin Membuka Tanah	Tersusunnya draft awal Perda IMT dan meningkatnya kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah	100%	220,460,000.00
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Terhimpunnya bahan penyusunan dasar hukum IMT	100%	71,480,000.00
			Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Terdaftarnya permohonan hak di Kantor Pertanahan	20	148,980,000.00
			Program Penatagunaan Tanah	Meningkatnya penataan tanah daerah	100%	16,987,000.00
			Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam 1 daerah kabupaten/Kota	Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam 1 daerah kabupaten/kota	100%	16,987,000.00
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	100%	16,987,000.00

3. Faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan.

Program penghargaan Adipura merupakan salah satu program strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berlingkup nasional untuk mewujudkan wilayah yang berwawasan lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Tujuannya untuk mendorong kepemimpinan pemerintah Kabupaten Kota dan membangun partisipasi aktif masyarakat serta dunia usaha melalui penghargaan Adipura, untuk mewujudkan wilayah yang berkelanjutan secara ekologis, sosial dan ekonomi.

Landasan hukum yang memayungi program Adipura ini adalah UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura. Komponen dasar penilaian penghargaan Adipura adalah :

1. Ruang terbuka hijau dan sampah;
2. Pengendalian pencemaran air;
3. Pengendalian pencemaran udara;
4. Adaptasi dan mitigasi dalam perubahan iklim;
5. Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
6. Pencegahan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat pertambangan.

Program penghargaan Adipura tahun ini mengalami beberapa perubahan mendasar yang diakibatkan oleh diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga (JAKSTRANAS). Dalam Perpres tersebut, menargetkan pada tahun 2025 sampah di Indonesia terkelola 100% dengan 30% pengurangan sampah dan 70% penanganan sampah. Oleh karena Program Adipura ini sedang fokus dengan pengelolaan sampah, dimana fokus Pemerintah Kabupaten Balangan adalah penanganan sampah yang semakin bertambah setiap harinya, maka Pemerintah Kabupaten Balangan melalui OPD terkait akan membuat beberapa kebijakan yang diharapkan akan dapat mendekatkan Kabupaten Balangan sebagai Kota Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.

Terdapat variabel fisik yang akan dipantau capaian kinerja pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijaunya, yaitu permukiman menengah dan sederhana, jalan, pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, rumah sakit / puskesmas, terminal, hutan kota, taman

kota, perairan terbuka sungai, TPA, bank sampah, pengolahan sampah skala kota. Sedangkan variabel non fisik yang akan dipantau antara lain institusi, manajemen, regulasi/kebijakan, data, upaya pengendalian dan peran serta masyarakat.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah pada RPJMD Dinas Lingkungan Hidup adalah Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan sedangkan sasaran strategis yang terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup yakni Meningkatnya indeks lingkungan hidup.

Pada Renstra Tahun 2021 – 2026 terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yakni:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Untuk mencapai indikator kinerja tersebut dapat dicapai melalui beberapa program dan kegiatan seperti pada tabel berikut. Kelompok sasaran dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut:

1. Dunia usaha
2. Masyarakat
3. Instansi terkait

Tabel . Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Tahun 2021	Target Capaian Setiap Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,71	67,71	67,21	67,75	68,09	68,31	68,54

Tabel. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2022.

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Balangan	100 %	1,070,232,860.00	APBD		100 %	1,530,000,000.00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja	Kab. Balangan	64	86,670,460.00	APBD		64	100,000,000.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Balangan	1	45,130,460.00	APBD		1	50,000,000.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja	Kab. Balangan	1	41,540,000.00	APBD		1	50,000,000.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Balangan	100%	69,860,000.00	APBD		100%	100,000,000.00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab. Balangan	14	-	APBD		14	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Balangan	4	33,890,000.00	APBD		4	50,000,000.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah penyusunan laporan keuangan SKPD	Kab. Balangan	12	35,970,000.00	APBD		12	50,000,000.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Kab. Balangan	100%	403,120,400.00	APBD		100%	710,000,000.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Balangan	5	10,000,000.00	APBD		5	50,000,000.00
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan		Kab. Balangan		14,720,400.00	APBD			50,000,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Balangan	360	8,400,000.00	APBD		360	10,000,000.00

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Balangan	300	370,000,000.00	APBD	300	600,000,000.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Balangan	100%	279,722,000.00	APBD	100%	350,000,000.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Balangan	10,000	34,200,000.00	APBD	10,000	50,000,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Balangan	12	120,000,000.00	APBD	12	150,000,000.00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Balangan		7,000,000.00	APBD		30,000,000.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Balangan	20	118,522,000.00	APBD	20	120,000,000.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Balangan	100%	230,860,000.00	APBD	100%	270,000,000.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Balangan	10	188,620,000.00	APBD	10	200,000,000.00
Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Balangan	3	42,240,000.00	APBD	3	70,000,000.00

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup	Kab. Balangan	100	213,000,000.00	APBD		100	213,000,000.00
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Kab. Balangan		213,000,000.00	APBD			213,000,000.00
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Kab. Balangan	300	213,000,000.00	APBD		300	213,000,000.00
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Kab. Balangan	67.21	715,000,000.00	APBD		67.21	1,090,000,000.00
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Kab. Balangan		615,000,000.00	APBD			890,000,000.00
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah titik tanah, air dan udara yang di amati	Kab. Balangan	30	150,000,000.00	APBD		30	170,000,000.00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Penurunan Emisi GRK (%)	Kab. Balangan	10	50,000,000.00	APBD		10	70,000,000.00
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah parameter sampel yang di uji	Kab. Balangan	20	415,000,000.00	APBD		20	650,000,000.00
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Kab. Balangan		50,000,000.00	APBD			100,000,000.00
Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah penghentian pencemaran/kerusakan lingkungan hidup.	Kab. Balangan	1	50,000,000.00	APBD		1	100,000,000.00

Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Kab. Balangan		50,000,000.00	APBD			100,000,000.00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah rehabilitasi	Kab. Balangan	1	50,000,000.00	APBD		1	100,000,000.00
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	Kab. Balangan	100	1,890,985,140.00	APBD		100	2,200,000,000.00
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	Kab. Balangan	100%	1,890,985,140.00	APBD		100%	2,200,000,000.00
Pengelolaan Kebun Raya	Jumlah luasan pengelolaan kebun raya	Kab. Balangan	10	300,000,000.00	APBD		10	500,000,000.00
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah luasan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Balangan	3	1,590,985,140.00	APBD		3	1,700,000,000.00
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Kab. Balangan	100	100,000,000.00	APBD		100	780,000,000.00
Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Pengawasan Pengendalian B3 dan Limbah B3	Kab. Balangan	100%	52,300,000.00	APBD		100%	80,000,000.00

Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah verifikasi lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Balangan	10	52,300,000.00	APBD		10	80,000,000.00
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengumpulan limbah B3	Kab. Balangan	100%	47,700,000.00	APBD		100%	700,000,000.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah limbah B3 yang dikelola	Kab. Balangan	2	47,700,000.00	APBD		2	700,000,000.00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.	Kab. Balangan	100	50,000,000.00	APBD		100	100,000,000.00
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.	Kab. Balangan	100%	50,000,000.00	APBD		100%	100,000,000.00
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan usaha/kegiatan yang izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.	Kab. Balangan	10	50,000,000.00	APBD		10	100,000,000.00
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH.	Kab. Balangan	100	35,325,000.00	APBD		100	100,000,000.00

Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH.	Kab. Balangan	100%	35,325,000.00	APBD		100%	100,000,000.00
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA.	Jumlah MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional yang di verifikasi.	Kab. Balangan	1	35,325,000.00	APBD		1	100,000,000.00
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kab. Balangan	100	35,000,000.00	APBD		100	1,000,000,000.00
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Balangan	2	35,000,000.00	APBD		2	1,000,000,000.00
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab. Balangan	2	35,000,000.00	APBD		2	1,000,000,000.00
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kab. Balangan	100	115,650,000.00	APBD		100	140,000,000.00
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerimaan Penghargaan Lingkungan hidup	Kab. Balangan	100%	115,650,000.00	APBD		100%	140,000,000.00

Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam pengelolaan perlingdunga dan pengelolaan lingkungan hidup.	Kab. Balangan	5	115,650,000.00	APBD		5	140,000,000.00
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	Kab. Balangan	100	55,000,000.00	APBD		100	800,000,000.00
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	Kab. Balangan	100%	55,000,000.00	APBD		100%	800,000,000.00
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani.	Kab. Balangan	5	55,000,000.00	APBD		5	800,000,000.00
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan	Kab. Balangan	99	3,219,820,000.00	APBD		99	3,950,000,000.00
Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah Terkelola	Kab. Balangan	99	3,219,820,000.00	APBD		99	3,950,000,000.00
Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah pengurangan sampah	Kab. Balangan	26	550,000,000.00	APBD		26	750,000,000.00
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan sampah	Kab. Balangan	73	2,669,820,000.00	APBD		73	3,200,000,000.00
Program Pengelolaan Izin Lokasi	Terlaksananya Koordinasi dan Singkronisasi Pemberian Izin Lokasi	Kab. Balangan	100%	12,200,000.00	APBD		100%	50,000,000.00

Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Balangan		12,200,000.00	APBD			50,000,000.00
Koordinasi dan Singkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal Dan Kemudahan Berusaha	Tersedianya data penerbitan Izin Lokasi dalam 1 tahun	Kab. Balangan	100%	12,200,000.00	APBD		100%	50,000,000.00
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		Kab. Balangan		46,740,000.00	APBD			50,000,000.00
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Balangan		46,740,000.00	APBD			50,000,000.00
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah garapan dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota		Kab. Balangan		46,740,000.00	APBD			50,000,000.00
Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee		Kab. Balangan		3,600,000.00	APBD			20,000,000.00
Penetapan Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah		Kab. Balangan		3,600,000.00	APBD			20,000,000.00
Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		Kab. Balangan		3,600,000.00	APBD			20,000,000.00
Program Pengelolaan Izin membuka Tanah		Kab. Balangan		220,460,000.00	APBD			250,000,000.00
Penerbitan Izin Membuka Tanah		Kab. Balangan		220,460,000.00	APBD			250,000,000.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah		Kab. Balangan		71,480,000.00	APBD			100,000,000.00

Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara		Kab. Balangan		148,980,000.00	APBD			150,000,000.00
Program Penatagunaan Tanah		Kab. Balangan		16,987,000.00	APBD			50,000,000.00
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam 1 daerah kabupaten/Kota		Kab. Balangan		16,987,000.00	APBD			50,000,000.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		Kab. Balangan		16,987,000.00	APBD			50,000,000.00

BAB VII

P E N U T U P

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan ini disusun sebagai arah kebijakan kegiatan perencanaan yang akan direalisasikan pada tahun 2022 mendatang. Renja ini merupakan penjabaran empiris dari Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, khususnya yang berkenaan dengan Dinas Lingkungan Hidup.

Sementara itu, di lain pihak pembuatan Renja ini juga sebagai perwujudan atas tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang sesuai dengan tuntutan zaman harus dijalankan secara efisien dan efektif, berdayaguna dan berhasil guna serta harus mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip **“Good Governance.”**

Dengan demikian, keberadaan konsepsi Renja oleh setiap SOPD sangat diperlukan dalam rangka memberdayakan dan mengoptimalkan fungsi dan peran SOPD yang bersangkutan agar dapat diciptakan kondisi yang maju dan proporsional secara terencana, sistematis, terarah, bertahap dan berkesinambungan.

Dinas Lingkungan Hidup menyadari benar bahwa, kinerja pemerintahan ini akan sulit berubah apabila kita tidak mampu melakukan transformasi sistem pemerintahan dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih memwirausahakan birokrasi pemerintah. Dengan kata lain mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan-masukan (***Inputs Oriented Accountability***) dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil (***Results Oriented Accountability***). Kita bersama tentunya tidak ingin lagi ada instansi pemerintah yang tidak jelas kinerja dan pelayanannya kepada masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk mendorong agar penyelenggaraan pelayanan di seluruh wilayah kabupaten balangan dapat dilaksanakan dengan berprinsip pada tata pemerintahan yang baik yang menuju kepada pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (***Results Oriented Government***).

Terakhir, bahwa Renja ini bersifat intern dan dinamis. Artinya dipergunakan untuk kalangan terbatas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan, namun bersifat fleksibel terhadap berbagai macam perubahan dan tuntutan baik yang dimunculkan oleh lingkungan internal maupun eksternal. Dinamis, berarti Renja Tahun 2022 ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategik (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 yang harus mampu menggambarkan kondisi yang jauh lebih baik daripada kondisi-kondisi sebelumnya dan harus mampu memberikan arahan bagi peningkatan dan pengembangan kondisi selanjutnya.

